

KINERJA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA MUARA DANAU KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Fito Apriandana^{1*}, Rahmat Safe'i¹, Indra Gumay Febryano¹, Hari Kaskoyo¹

¹Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung,
Jln Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*E-Mail: rahmat.safe'i@fp.unila.ac.id

Artikel diterims : 23 Agustus 2020. Revisi diterima : 22 Desember 2020.

ABSTRACT

The existence of the LPHD is considered important, because it can improve the standard of living of the community around the forest area as well as be able to maintain the stability of the forest ecosystem, one of which is the LPHD Muara Danau, but its management is still considered not optimal in developing agroforestry businesses. This study aims to analyze the performance of the LPHD Muara Danau in village forest management. The research methodology are interviews, observation, and documentation studies. The data obtained were analyzed descriptively. Results showed that the performance of the Muara Danau LPHD was categorized as quite good, this was seen from three aspects, namely institutional, area and business management. The institutional management aspect is measured based on the participation of the management and LPHD members in participating in the activities as many as >75% of the members are present in the activity (91%) and the type of binding group rules in the form of (AD/ART) and unwritten rules (84%) and area management is measured based on types of forest resource conservation activities carried out were 52 people (95%) and the impact that was felt by 2-4 impacts on the environment from Village Forest management was 48 people (87%). However, business management has not yet achieved optimal results, measured based on the absence of local institutions (cooperatives) that carry out marketing of forest products. LPHD agroforestry business development needs to be increased in order to maximize the marketing of forest products.

Key words : Village Forest, LPHD Muara Danau, Performance, Resource, Agroforestry Bussines

ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa dinilai penting, karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus mampu menjaga kestabilan ekosistem hutan, salah satunya LPHD Muara Danau, namun pengelolaannya dinilai masih belum maksimal pada pengembangan usaha agroforestri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja LPHD Muara Danau dalam pengelolaan Hutan Desa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja LPHD Muara Danau dikategorikan cukup baik, hal ini dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Aspek kelola kelembagaan diukur berlandaskan partisipasi pengurus dan anggota LPHD dalam mengikuti kegiatan sebanyak >75% anggota hadir dalam kegiatan (91%) dan jenis aturan kelompok yang mengikat berupa (AD/ART) dan aturan tidak tertulis (84%) dan kelola kawasan diukur berlandaskan jenis aktivitas konservasi sumberdaya hutan yang dilakukan sebanyak 52 orang (95%) serta dampak yang dirasakan 2-4 dampak terhadap lingkungan dari pengelolaan HD sebanyak 48 orang (87%). Namun, pada kelola usaha belum mencapai hasil yang optimal, diukur berlandaskan tidak adanya lembaga lokal (koperasi) yang menjalankan pemasaran hasil hutan. Pengembangan usaha agroforestri LPHD perlu ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan pemasaran hasil hutan.

Kata Kunci : Hutan Desa, LPHD Muara Danau, Kinerja, Sumberdaya, Usaha Agroforestri

PENDAHULUAN

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang sifat alamnya diperuntukkan sebagai pengendali tata air, pencegah banjir dan erosi serta proteksi kesuburan tanah. Secara formal hutan lindung diatur dalam Undang-Undang No. 41

Tahun 1999 menjelaskan tentang fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak terlepas

dari masyarakat di dalamnya yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap lingkungan. Sejalan dengan penelitian Baynes *et al.* (2015); Brown & Sonwa (2015); Pujo *et al.* (2018); Herwanti *et al.* (2019) bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatannya. Katila *et al.* (2017) berpendapat bahwa lebih dari setengah miliar orang terlibat dalam pengelolaan hutan. Meskipun memberikan banyak manfaat, namun keberadaan hutan lindung belum direspon secara baik oleh masyarakat sebagai contoh belum mantapnya lembaga yang berperan sebagai penanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan lindung. Menurut Safe'i *et al.* (2018) bahwa adanya koordinasi yang dibangun antar pengelola akan berimplikasi terhadap kelembagaan dalam pengelolaan hutan yang baik.

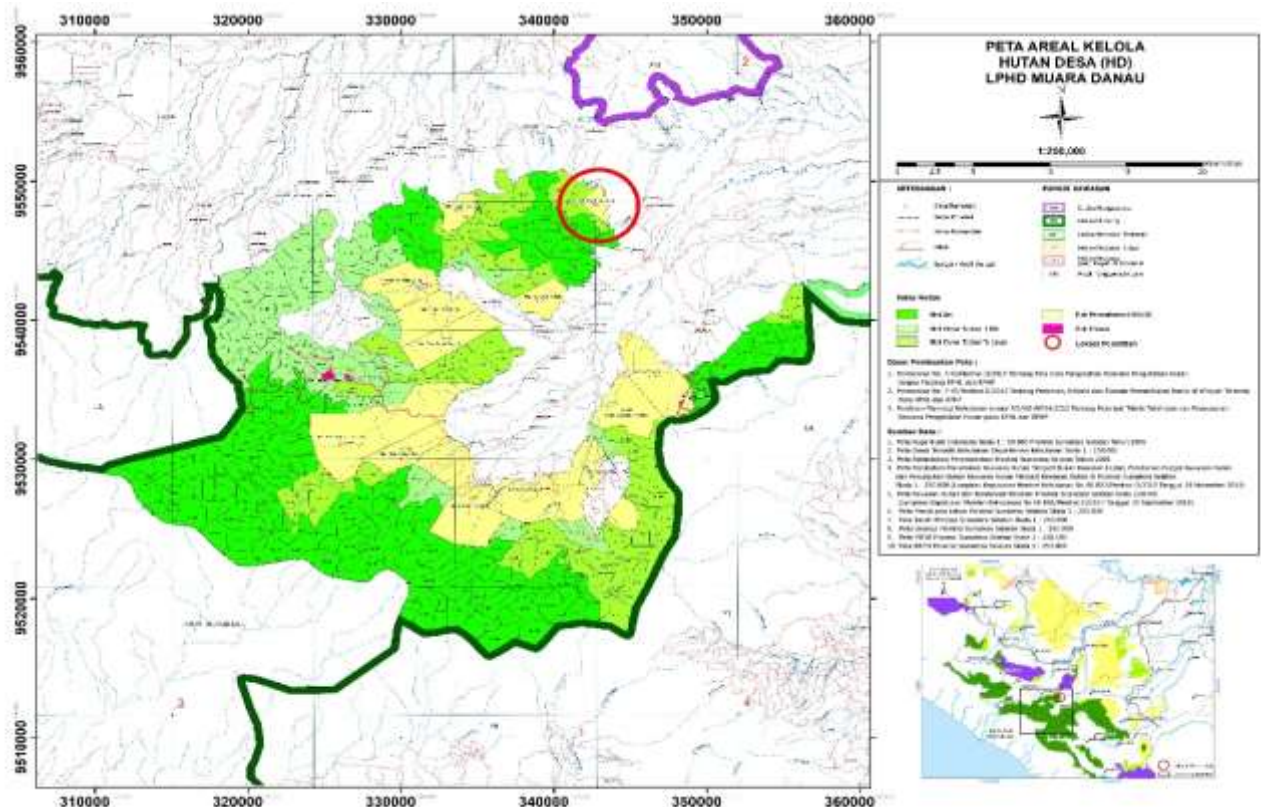
Pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat dalam pengaturan hutan secara kooperatif melalui perhutanan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa skema berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan. Tujuan pembangunan perhutanan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mengelola hutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Menurut Novayanti *et al.* (2017); Banuwa *et al.* (2018); Laksemi *et al.* (2019) bahwa P.83/Menhut-II/2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan tersebut, Hutan Desa (HD) merupakan salah satu skema dari perhutanan sosial. Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal ini HD, berperan serta dalam penyelenggaraan HD memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Abidin *et al.* 2016; Mulyana *et al.* 2018; Sedia *et al.* 2018; Asmin *et al.* 2019).

Pelaksanaan kegiatan HD terdapat lembaga di dalamnya, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Qurniati *et al.* (2017) menjelaskan LPHD merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola. Keberadaan LPHD dinilai

penting bagi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan fungsi hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. Agar bisa mencapai tujuan pengelolaan, LPHD Muara Danau yang di dalamnya terdapat aturan-aturan baik internal maupun eksternal serta sanksi-sanksi yang dijalankan menjadi sistem kontrol pengurus dan anggota dalam aktivitas pengelolaan hutan. Usaha agroforestri menjadi salah satu indikator kinerja LPHD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun LPHD Muara Danau tergolong belum efektif dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana memasarkan produk hasil tani dalam bentuk lembaga lokal. Hal tersebut yang menyebabkan kinerja LPHD Muara Danau tergolong belum baik. Oleh karena itu diperlukan kajian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja LPHD Muara Danau.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2020 di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). Secara geografis Hutan Desa Muara Danau berada diantara 4°4'21,7"-4°6'2,1" LS dan 103°34'27,1"-103°35'32,0" BT. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner secara terstruktur. Penentuan responden dilakukan dengan dua cara, yaitu *purposive sampling* dan *random sampling*. *Purposive sampling* terdiri dari (pengurus LPHD 7 orang, kepala KPH 1 orang, dan staf KPH bagian pengelolaan HD 1 orang). *Random sampling* (Sugiyono, 2017) terdiri dari anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) LPHD Muara Danau yang dipilih secara acak berdasarkan formula Slovin sebanyak 55 sampel dengan total anggota 120 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan penilaian kinerja lembaga LPHD Muara Danau secara rinci berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha.



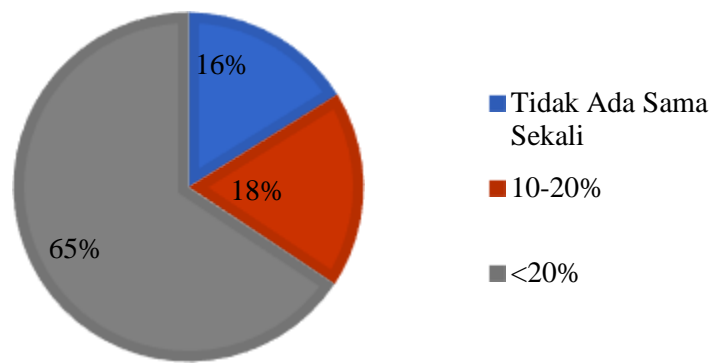
Gambar 1. Lokasi penelitian di Hutan Desa Muara Danau, Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelola Kelembagaan

Lembaga Pengelola Hutan Desa diberi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atas dasar surat keputusan Men LHK tentang penetapan areal kerja yang kemudian terdapat struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi unit usaha yang dimiliki terkait pengelolaan HD. Struktur kepengurusan LPHD Muara Danau dimuat ke dalam lampiran dari SK.622/Menhut-II/2014. Tercatat 120 orang yang terdaftar sebagai anggota di LPHD Muara Danau sebanyak 55 responden menunjukkan bahwa alasan keikutsertaan kaum wanita <20% dikarenakan sudah berstatus menikah dan keanggotaan dari LPHD sendiri ikut atas nama suami. Kaum wanita lebih memilih membantu pekerjaan rumah dan hasil panen lahan

untuk diolah dan kemudian dipasarkan. Sejalan dengan penelitian Nugroho *et al.* (2017) bahwa kegiatan usaha agroforestri merupakan mata pencaharian utama yang didominasi oleh laki-laki, perempuan lebih cenderung mengurus rumah tangga. Berbeda dengan alasan kaum wanita yang ikut dalam keanggotaan LPHD sebanyak 10-20% (Gambar 2). Sarmanudin (Ketua LPHD) menjelaskan bahwa alasan kaum wanita ikut serta dalam keanggotaan LPHD Muara Danau dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 1) warisan orang tua, 2) menjadi tulang punggung keluarga dan 3) membantu perekonomian keluarga. Padahal keikutsertaan kaum wanita memberikan dampak positif pada pembangunan suatu LPHD. Sejalan dengan penelitian Kusmayadi (2017) wanita memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan suatu lembaga.

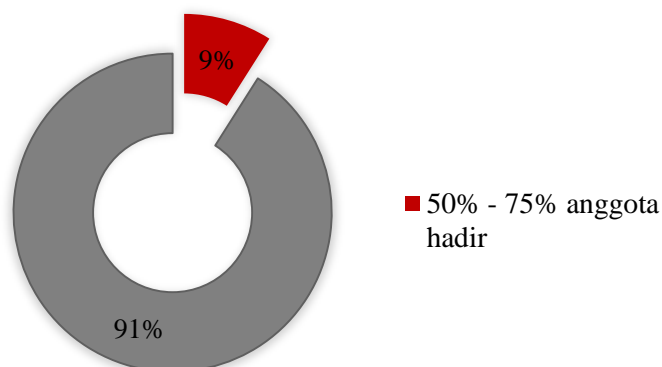


Gambar 2. Keikutsertaan wanita dalam keanggotaan

Peningkatan produktivitas merupakan bagian dari penguatan kelembagaan yang dipengaruhi oleh keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok. Menurut Yuniati *et al* (2017) penguatan kelembagaan akan mempengaruhi peningkatan produktivitas petani. Kehadiran anggota >75% dalam kegiatan kelompok terlepas dari wajibnya diadakan pertemuan rutin, karena anggota yang tertarik untuk mengikuti ketika ada program bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana usaha agroforestri (Gambar 3). Hal ini yang menyebabkan kehadiran anggota mencapai >75%.

Keaktifan anggota dalam kegiatan akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas lembaga. Sejalan dengan penelitian Bowo *et al.* (2011) manfaat yang diperoleh dari adanya kegiatan pertemuan secara rutin antara pengurus

dan anggota, antara lain: 1) tingkat perwujudan kegiatan pertemuan rutin anggota kelompok relatif lebih baik, 2) tingkat ukuran intens dari kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan rutin relatif lebih baik, 3) tingkat penyesuaian antara kegiatan pertemuan rutin dengan rencana kerja kelompok relatif lebih baik, dan 4) tingkat kesepakatan dalam menyetujui rencana kerja kelompok relatif lebih baik. Secara umum, kehadiran anggota LPHD Muara Danau ditentukan berdasarkan undangan yang diterima atau kebutuhan kelompok dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan kelompok tersebut lalu disepakati untuk kegiatan dilakukan secara terstruktur, yaitu rencana tahunan dan rencana jangka menengah (5 tahun) berdasarkan AD/ART. Jenis kegiatan kelompok di LPHD Muara Danau berupa penanaman dan patroli (perlindungan dan pengamanan hutan).



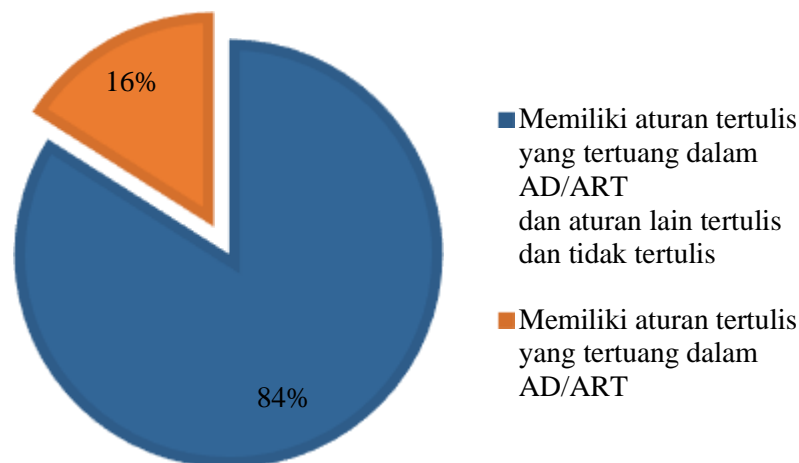
Gambar 3. Keterlibatan pengurus dan anggota LPHD dalam kegiatan

Implementasi kegiatan kelompok di awasi oleh pengurus dan anggota secara pasrtisipatif dan terencana. Pelaksanaan kegiatan diatur dalam

AD/ART dan RPHD yang menjelaskan rancangan terselenggaranya kegiatan kelompok. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan tertuang ke dalam AD/ART (aturan tertulis) dan aturan tidak tertulis merupakan wujud dari peninjauan setiap kegiatan masyarakat dalam mengelola lahan HD. Aturan telah dipahami oleh seluruh pengurus maupun anggota, sehingga peluang terjadinya pelanggaran akan semakin kecil (Djelau *et al.* 2014). Pengetahuan aturan tertulis (AD/ART) dan tidak tertulis mempengaruhi terlaksananya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Namun, tidak semua

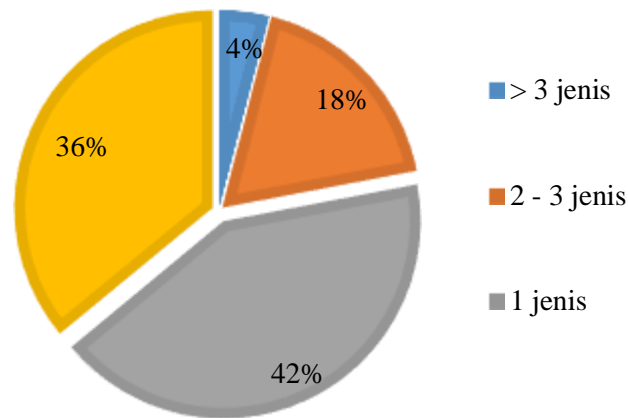
anggota mengetahui adanya aturan tidak tertulis. Sarmanudin (Ketua LPHD) mengatakan alasan para pengelola tidak mengetahui aturan tersebut karena mereka lupa bahwa ada aturan yang mereka sepakati (tidak tertulis) bersama. Aturan ini berupa larangan untuk tidak memindahtangankan lahan garapan kepada orang lain dan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.



Gambar 4. Jenis aturan kelompok yang mengikat

Kapasitas kelembagaan anggota LPHD Muara Danau dapat dipengaruhi oleh kedinamisan dan keterlibatan anggota. Sejalan dengan penelitian Ruhimat (2017) bahwa kedinamisan dan peran serta anggota secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan kelompok. Pengembangan kapasitas kelembagaan yang diusahakan LPHD Muara Danau berupa pelatihan yang ditujukan kepada anggota. Pelatihan yang diikuti biasanya dari program pemerintah atau LSM. Sangat sedikit anggota LPHD yang mengikuti >3 jenis pelatihan. Hal ini, dikarenakan jenis pelatihan yang diselenggarakan

meminta pendelegasian dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pendelegasian mengikuti kegiatan pelatihan biasanya dipilih yang memiliki kemampuan untuk menerima materi secara cermat, sehingga mampu mendesiminasikan kepada anggota lain. Veronice *et al.* (2018) berpendapat bahwa pelatihan merupakan salah satu poin penting dalam rangka pengembangan kapasitas SDM agar mampu menghadapi persaingan global. Berdasarkan P.57/Menhut-II/2014 Pasal 27 poin f bahwa Pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.



Gambar 5. Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota

B. Kelola Kawasan

Kelola kawasan merupakan suatu kegiatan yang berpusat pada pengelolaan lahan yang menjadi ladang pekerjaan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem hutan melalui perlindungan dan pengamanan hutan. LPHD Muara Danau menggunakan sistem pemanfaatan kawasan dengan pola penanaman agroforestri, khususnya kopi (Lestari & Prenomo, 2014 dan Tiurmasari *et al.* 2016). Studi yang dikemukakan Salampessy *et al.* (2013); Salampessy *et al.* (2017) di Maluku, bahwa pola agroforestri yang dikenal sebagai *dusung* menerapkan praktek dimana satu tanaman komersial (pala) diselingi di seluruh kebun. Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang memadukan antara pepohonan dan tanaman semusim dalam suatu sistem pengelolaan lahan (Yulian *et al.* 2016; Puspasari *et al.* 2017; Nasichah *et al.* 2018; Wanderi *et al.* 2019). Pola penanaman ini didasari oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 pada Pasal 7 Ayat 3 poin d: pemanfaatan kawasan hutan meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar atau budidaya hijauan makanan ternak, *agroforestry*, *silvopasture* dan *silvofishery*.

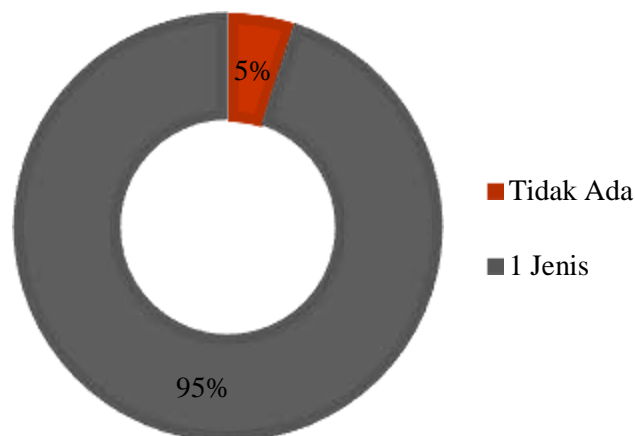
Agroforestri yang dikembangkan LPHD Muara Danau memiliki kopi sebagai komoditi utama ditanam bersama tanaman buah-buahan dan pertanian, yaitu durian (*Durio zibethinus*), jengkol (*Archidendron pauciflorum*), alpukat (*Persea americana*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*),

cempedak (*Artocarpus integer*), matoa (*Pometia pinnata*), dan petai (*Parkia speciosa*). Tanaman tersebut merupakan jenis MPTs atau berkanopi tinggi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk ditanam selain kopi. Studi yang dilakukan Qurniati *et al.* (2017) di Sidodadi mengemukakan bahwa masyarakat dianjurkan pemerintah untuk menanam tanaman selain kopi dan kakao seperti seperti kayu keras dan MPTs. Jenis tanaman tersebut merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan konflik kemiskinan dan kerusakan fungsi ekologis. Masyarakat sekitar merasakan dampak terhadap penggunaan pola agroforestri berupa perlindungan keanekaragaman hayati, berbagai macam produksi hasil hutan dan kelancaran mengkonsumsi air bersih.

Pemahaman batas-batas wilayah kelola antar anggota dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota KUPS. Sarmanudin (Ketua LPHD) mengatakan tata batas antar pengelola menggunakan tanaman berupa pinang (*Areca catechu*), bambang lanang (*Michelia champaca*, dan junjung merah. Studi yang dilakukan Salampessy *et al.* (2012) di Maluku mengemukakan bahwa batas antar pengelola “*dusung*” menggunakan tanaman, batu dan pohon. Pihak yang bertanggungjawab terkait batas-batas pembagian wilayah adalah pengurus dan anggota LPHD. Adanya batas-batas yang dibuat pada areal kerja berfungsi untuk meminimalisir terjadinya konflik klaim lahan antar pengelola dan membuat wilayahnya menjadi eksklusif.

Hutan Desa Muara Danau secara administratif dikelola oleh LPHD memiliki beberapa jenis jasa lingkungan, berupa sumber mata air dan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. LPHD membuat aturan tidak tertulis kepada masyarakat yang memiliki lahan berdekatan dengan aliran sungai. Aturan tersebut berupa kegiatan konservasi sempadan sungai, pada umumnya anggota yang berdekatan dengan aliran sungai melakukan penanaman berupa bambu (Gambar 6). Sejalan dengan penelitian

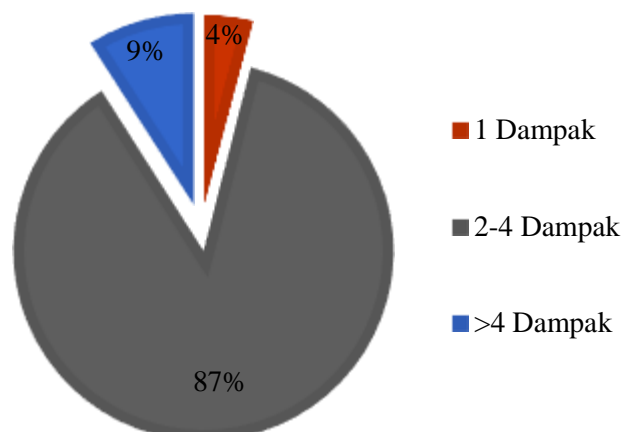
Aminah *et al.* (2017) di Kota Agung bahwa tanaman pala merupakan langkah yang diambil masyarakat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan konservasi tanah dan air. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan sudah sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor SK.386/KPTS/DISHUT/2016 tentang IUPHHK-HD kepada LPHD Muara Danau putusan ke-5 poin (g) tentang kewajiban untuk melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan.



Gambar 6. Jenis aktivitas konservasi sumberdaya hutan

Aktivitas pemanfaatan hasil hutan di kawasan hutan lindung dengan pola agroforestri memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan berupa penambahan sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan kebakaran hutan. Anggota LPHD Muara Danau berasumsi bahwa 2-4 dampak positif yang mereka rasakan terhadap lingkungan sejak menerapkan

skema HD. Lahan yang awalnya mengalami penurunan fungsi ekologi, kini mampu kembali berperan menjalankan fungsinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis tanaman yang dipilih berfungsi menjaga kestabilan ekosistem lingkungan. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan diatur dalam P.57/Menhut-II/2014 Pasal 28 poin e.



Gambar 7. Dampak terhadap lingkungan dari pengelolaan hutan desa

C. Kelola Usaha

Hutan Desa Muara Danau yang dikelola LPHD memiliki ragam jenis komoditi dari hasil produksi dalam satu areal lahan. Produksi hasil hutan anggota berupa kopi, durian, alpukat, jengkol, dan pete. Menurut Syofiandi *et al.* (2016) luas dan jumlah pohon pada suatu areal lahan akan mempengaruhi produk dan pendapatan usaha agroforestri. LPHD Muara Danau memproduksi kopi sebagai pendapatan utama (Winarni *et al.* 2016; Febryano, 2008; Rajagukguk *et al.* 2018). Kopi yang telah dipanen kemudian dijemur lalu dipasarkan dengan harga kisaran Rp 18.000 - Rp 20.000. Kopi yang dipasarkan masih melalui tengkulak, belum ada lembaga lokal yang menangani bidang pemasaran. Koperasi merupakan badan/lembaga lokal yang direncanakan oleh pengurus dan anggota sejak terbentuknya LPHD tahun 2011. Tujuan dibentuknya koperasi untuk memudahkan anggota dalam memasarkan hasil hutan mereka dan menjadi salah satu dalam penguatan kelembagaan. Modal awal yang digunakan kelompok untuk keperluan internal berasal dari swadaya murni/kemampuan daya dan dana kelompok. Sarmanudin (Ketua LPHD) mengatakan koperasi berfungsi untuk penguatan ekonomi kelompok dan anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Anggota LPHD sangat bergantung kepada hasil produksi lahan yang mereka garap. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD), padahal mereka dapat mengembangkan hasil hutan mereka melalui koperasi. Pendirian badan koperasi mengalami pendepakan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang kurang percaya akan kinerja koperasi dalam menjalankan pemasaran hasil hutan mereka. Pengaruh yang diterima, yaitu tidak adanya mitra yang bekerjasama yang menyebabkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja sampai saat ini. Sejalan dengan penelitian Pratiwi *et al.* (2019) bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan kepercayaan seseorang.

Penilaian kinerja LPHD Muara Danau dapat dikatakan melembaga, artinya LPHD ini sudah menerapkan AD/ART dan RPHD yang

ditetapkan. Aturan-aturan, sanksi dan larangan yang sudah sesuai berdasarkan P.83/Menhut-II/2016, Sk.622/Menhut-II/2014, Sk.386/Kpts/Dishut/2016, AD/ART dan RPHD. Aturan-aturan main yang telah dipahami seluruh anggota LPHD, terutama dalam pemanfaatan kawasan dan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, namun pada kelola usaha belum termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini karena belum adanya lembaga lokal yang membantu anggota dalam menjalankan pemasaran hasil hutan mereka. Perlu adanya evaluasi dalam meningkatkan kelola usaha berupa penerapan asas keterbukaan terkait informasi kelola usaha, pembentukan kelembagaan lokal yang menangani bidang pemasaran, dan inovasi produk hasil hutan.

KESIMPULAN

Kinerja LPHD Muara Danau berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan Hutan Desa agar tetap lestari. Penilaian kinerja ditentukan berdasarkan aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Kinerja LPHD Muara Danau dikategorikan baik pada aspek kelola kelembagaan dan kelola kawasan yang dilihat berdasarkan jenis aturan tertulis (AD/ART) dan aturan tidak tertulis (84%), keterlibatan pengurus dan anggota dalam kegiatan >75%, (91%) anggota melakukan aktivitas konservasi sumberdaya hutan serta (87%) anggota yang merasakan dampak terhadap lingkungan dari penerapan program HD. Namun, pada aspek kelola usaha belum mencapai hasil yang optimal karena tidak adanya lembaga lokal (koperasi) yang menjalankan pemasaran hasil hutan sehingga pemasarannya masih dilakukan secara individu. Pembinaan terhadap masyarakat perlu dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan instansi terkait tentang peluang pemasaran hasil hutan dengan cara membuat lembaga usaha dalam LPHD dan rencana kerjasama serta mitra kerja dengan berbagai usahawan dalam pemasaran. Perlu dilakukan kajian persepsi masyarakat terhadap pentingnya lembaga lokal dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi pemanfaatan lahan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota LPHD Muara Danau yang telah kooperatif dalam membantu kelancaran penelitian ini, terima kasih juga disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Semendo yang telah membantu dalam pemberian data.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah LN, Safe'i R, Febryano IG. 2017. Analisis Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Journal of Sylva Indosiana*, 1 (1) : 29-35.
- Asmin F, Darusman D, Ichwandi I, Suharjito D. 2019. Mainstreaming Community-Based Forest Management in West Sumatera: Social Forestry Arguments, Support, and Implementation. *Forest and Society*, 3 (1) : 77-96.
- Abidin S, Muin S, Oramahi HA. 2016. Sikap Masyarakat Terhadap Penetapan Areal Kerja Hutan Desa di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4 (2) : 193-204.
- Banuwa IS, Safe'i R, Febryano IG, Novayanti D. 2018. Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di KPH Gedong Wani. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20 (1) : 29-38.
- Baynes J, Herbohn J, Smith C, Fisher R, Bray D. 2015. Key Factors Which Influence The Success of Community Forestry in Developing Countries. *Global Environmental Change*, 35 : 226-238.
- Bowo C, Supriono A, Hariyono K, Kosasih S. 2011. Dinamika Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat Lahan Kering di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5 (3) : 3-38.
- Brown HCP, Sonwa DJ. 2015. Rural Local Institutions and Climate Change Adaptation in Forest Communities in Cameroon. *Ecology and Society*, 20 (2) : 1-9.
- Djelau I, Panjaitan PBP, Susdiyanti T. 2014. Kajian Kelembagaan Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Durjela Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku. *Jurnal Nusa Sylva*, 14 (1) : 43-54.
- Febryano IG. 2008. Analisis Finansial Agroforestri Kakao di Lahan Hutan Negara Dan Lahan Milik. *Perennial*, 4 (1) : 41-47.
- Hapsari F, Surya SD. 2017. Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Wanita dan Keluarga di Kelurahan Ciracas. *Journal of Applied Business and Economics*, 4 (3) : 266-276.
- Herwanti S, Febryano IG, Zulfiani D. 2019. Economic Value Analysis of Community Forest Food Products in Ngarip Village, Ulu Belu Subdistrict, Tanggamus Regency (A case from Indonesia). *Forestry Ideas*, 25 (2) : 316-328.
- Katila P, De Jong W, Galloway G, Pokorny B, Pacheco P. 2017. Harnessing Community and Smallholder Forestry for Sustainable Development Goals. *International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)*, pp. 1-24. Wina, Austria.
- Kusmayadi RCR. 2017. Kontribusi Pekerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagad di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (1) : 103-113.
- Laksemi NPST, Sulistyawati E, Mulyaningrum. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7 (2) : 150-163.
- Lestari S, Premono BT. 2014. Penguatan Agroforestri Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim: Kasus Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11 (1) : 1-12.

- Marasabessy H. 2018. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelembagaan Sasi Hutan di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 2 (1) : 49-69.
- Mulyana L, Febryano IG, Safe'i R, Banuwa IS. 2017. Performa Pengelolaan Agroforestri di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa. *Jurnal Hutan Tropis*, 5 (2) : 127-133.
- Nasichah Z, Harianto SP, Winarno GD. 2018. Mitigasi Gangguan simpai (*Presbitys melalophos*) Pada Lahan Agroforestri di Hutan Lindung Register 25 Pematang Tanggang, Kelumbayan, Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 6 (2) : 7-15.
- Novayanti D, Banuwa IS, Safe'i R, Wulandari C, Febryano IG. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedong Wani. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9 (2) : 61-74.
- Nugroho AKB, Sumekar W, Mukson. 2017. Faktor-faktor dalam Kegiatan Kelompok Tani dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1 (2) : 198-210.
- Pratiwi AM, Kaskoyo H, Herwanti S. 2019. Efisiensi Pemasaran Agroforestri Berbasis Kopi Berdasarkan Keragaan Pasar: Studi Kasus di Pekon Air Kubang, Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 7 (3) : 299-308.
- Pujo, Sofhani TF, Gunawan B, Syamsudin TS. 2018. Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review. *Journal of Regional and City Planning*, 29 (2) : 113-126.
- Puspasari E, Wulandari C, Darmawan A, Banuwa IS. 2017. Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Sylva Lestari*, 5 (3) : 95-103.
- Qurniati R, Duryat, Kaskoyo H. 2017. Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Desa di Sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Sakai Sambayan*, 1 (3) : 80-86.
- Qurniati R, Febryano IG, Zulfiani D. 2017. How Trust Influence Social Capital to Support Collective Action in Agroforestry Development?. *Biodiversitas*, 18 (3) : 1201-1206.
- Rajagukguk CP, Febryano IG, Herwanti S. 2018. Perubahan komposisi jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan agroforestri damar, *Jurnal Sylva Lestari*, 6 (3) : 18-27.
- Ruhimat IS. 2017. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usahatani Agroforestry: Studi kasus di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14 (1) : 1-17.
- Safe'i R, Febryano IG, Aminah LN. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 20 (2) : 109-114.
- Salampessy ML, Bone I, Febryano IG. 2012. Performansi Dusun Pala Sebagai Salah Satu Agroforestri Tradisional di Maluku. *Tengkawang*, 2 (2) : 55-65.
- Salampessy ML, Febryano IG, Zulfiani D. 2017. Bound By Debt: Nutmeg Trees and Changing Relations Between Farmers and Agents in A Moluccan Agroforestry Systems. *Forest and Society*, 1 (2) : 60-66.
- Sedia G, Fanani Z, Wieke, Hasanah N. 2018. Village's Forest Conservation Concept with Local Wisdom at Ensaed Panjang Village, Kelam Permai, West Kalimantan. *Humanities and Social Science Reviews*, 23 (3) : 12-24.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharti S, Darusman D, Nugroho B, Sundawati L. 2016. Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4 (2) : 165-175.

- Syiofiandi RR, Hilmanto R, Herwanti S. 2016. Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 4 (2) : 17-26.
- Tiurmasari S, Hilmanto R, Herwanti S. 2016. Analisis Vegetasi Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pengelola Agroforestri di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 4 (3) : 71-82.
- Veronice, Helmi, Henmaidi, Arif E. 2018. Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Petani Kecil di Kawasan Pertanian Melalui Pendekatan Manajemen Pengetahuan. *Journal of Applied Agricultural Science and Technology*, 2 (2) : 1-10.
- Wanderi W, Qurniati R, Kaskoyo H. 2019. Kontribusi Tanaman Agroforestri Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Sylva Lestari*, 7 (1) : 118-127.
- Winarni S, Yuwono SB, Herwanti S. 2016. Struktur Pendapatan, Tingkat Kesejahteraan Dan Faktor Produksi Agroforestri Kopi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege (Studi di Gabungan Kelompok Tani Karya Tani Mandiri), *Jurnal Sylva Lestari*. 4 (1) : 1-10.
- Yulian R, Hilmanto R, Herwanti S. 2016. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani Agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jayadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 4 (2) : 39-50.
- Yuniati S, Susilo D, Albayumi F. 2017. Penguatan Kelembagaan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu. Seminar Nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017), pp. 498-505. Universitas Jember, Jember.